

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya bergantung pada dana yang dipercayakan oleh pengguna jasanya atau nasabah. Stabilitasnya perekonomian suatu negara juga dipengaruhi dari kesehatan sistem perbankan, tanpa adanya lembaga bank yang mampu untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana dari masyarakat maka sektor- sektor perekonomian tidak akan mampu atau sulit untuk berkembang.

Kinerja perusahaan merupakan salah satu ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi- fungsi keuangan dalam perusahaan. Ukuran kinerja perusahaan yang baik diawali dengan adanya kepercayaan dari investor terhadap suatu perusahaan bahwa dana yang mereka investasikan dalam kondisi yang aman dan diharapkan akan memberikan return yang baik pula. Jika suatu perusahaan memiliki kepercayaan dari investor, maka para investor dan stakeholders lainnya tidak akan ragu untuk melakukan investasi yang akan menyebabkan nilai perusahaan akan meningkat. Pengukuran suatu kinerja perusahaan yang baik maupunburuk dapat dilihat dari peningkatan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja suatu perusahaan di masa lampau, serta prospeknya di masa yang akan datang (Sukamulja, 2004).

Kinerja perusahaan yang buruk dikarenakan tidak tercapainya efisiensi pasar sehingga peluang bisnis banyak yang hilang, sedangkan masalah keuangan pada perusahaan tersebut akan menyebar dengan sangat cepat ke perusahaan lain, karyawan, kreditor, pemerintah, konsumen, maupun stakeholders lainnya. Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif menyebabkan sangat banyak pengaruh atau dampak yang sangat signifikan dalam hal persaingan, produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan penanganan transaksi antara perusahaan dengan konsumen dan perusahaan dengan perusahaan lain. Persaingan yang bersifat global dan tajam menyebabkan terjadinya pengurangan laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang memasuki persaingan tingkat dunia. Hanya perusahaan yang mempunyai keunggulan yang mampu memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen, mampu menghasilkan produk yang bermutu, dan cost efektif (Srimindarti, 2004).

Perubahan-perubahan tersebut mendorong perusahaan untuk mempersiapkan diri agar bisa diterima di lingkungan global. Kunci persaingan dalam pasar global adalah kualitas total yang mencakup penekanan-penekanan pada kualitas produk, kualitas biaya atau harga, kualitas pelayanan, kualitas penyerahan tepat waktu, dan kepuasan-kepuasan lain yang terus berkembang guna memberikan kepuasan terus menerus kepada pelanggan.

Lemahnya *corporate governance* ditandai dengan adanya tindakan- tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan para investor, sehingga menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan. Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Corporate Governance* merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh Dewan Komisaris dan Auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang fair. Lemahnya penerapan *corporate governance* inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan. Banyak pihak yang mulai berpikir bahwa penerapan *corporate governance* menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan. Menurut Monks dan Minow (2003). *Good Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks dan Minow, 2003).

Sebagai sebuah sistem, *Good corporate governance* terdiri dari berbagai sub-sistem yang saling terintegrasi dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan (*companies performance*), dalam suatu bentuk struktur dan mekanisme *governance* , baik dari sisi eksternal maupun dari sisi internal perusahaan.

Suranta dan Merdistusi (2005) menyatakan bahwa *Good corporate governance* merupakan sebuah sistem guna mengontrol dan mengarahkan perusahaan Suranta dan Medistusi, 2005

Prinsip utama dalam *Good corporate governance* hanya terdiri dari tiga prinsip yaitu:

(1) keterbukaan, (2) integritas, dan (3) akuntabilitas.

Berdasarkan dari beberapa defenisi diatas GCG merujuk pada seperangkat aturan, praktik, dan proses pengendalian perusahaan dengan melibatkan penyeimbangan kepentingan pemangku perusahaan, seperti pemegang saham, manajemen, konsumen, pemasok, pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Hal tersebut penting untuk diterapkan guna menjamin kesehatan dari perusahaan atau bisnis yang sedang berjalan. Bagaimanapun, suatu perusahaan atau korporasi dikatakan mempunyai tata kelola yang baik jika setiap proses pengungkapan dan transparansi dipatuhi. Dengan demikian, informasi yang diberikan kepada regulator, pemegang saham, dan masyarakat umum tepat dan akurat, baik dalam aspek keuangan, operasional, maupun aspek lainnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, (2014) Agar perusahaan sektor keuangan khususnya perusahaan perbankan memiliki kinerja keuangan yang sehat, berkesinambungan, dan dapat melindungi kepentingan pelanggan maka perlu dikembangkan dengan baik penerapan GCG nya (Otoritas Jasa Keuangan, 2014)

Berdasarkan yang telah dibahas sebelumnya bahwa Penerapan GCG yang baik didasarkan pada asas kewajaran, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kemandirian atau independensi. Penerapan GCG juga dilakukan untuk meningkatkan nilai shareholder, dan memastikan manajer melakukan kinerjanya untuk meningkatkan return bagi pemegang saham..

Sistem *Corporate governance* dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para pemegang saham dan kreditor sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa akan memperoleh return yang baik atas dana yang telah diinvestasikan. *Good Corporate governance* dianggap sebagai suatu mekanisme yang dapat melindungi pihak minoritas dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer serta pemegang saham pengendali dengan menekankan pada mekanisme legal. *Good Corporate governance* merupakan suatu konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Jika mekanisme *Good Corporate governance* tidak diterapkan atau tidak berfungsi dengan baik dalam perusahaan, maka hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan investor dan nilai perusahaan, serta dapat menyebabkan kinerja perusahaan yang kurang baik. Penerapan GCG yang dilakukan dengan efektif dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus kepercayaan investor. Peningkatan penerapan GCG menjadi kebutuhan yang

mendasar sebab investasi akan mengikuti sektor yang mengadopsi standar tata kelola efisien. Perusahaan yang menerapkan GCG seharusnya memiliki kinerja perusahaan yang baik.

Penerapan *Good Corporate Governance* juga menjadi permasalahan yang penting dalam dunia perbankan. Semenjak krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997 telah menghancurkan berbagai sendi perekonomian salah satunya perbankan yang mengakibatkan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional. Dalam seminar restrukturisasi perbankan di Jakarta pada tahun 1998 disimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja perbankan, antara lain semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan, yang menyebabkan bank harus menyediakan cadangan penghapusan hutang yang cukup besar sehingga mengakibatkan kemampuan bank memberikan kredit menjadi terbatas; dampak likuiditas bank yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah, sehingga memicu penarikan dana yang secara besar-besaran; semakin turunnya permodalan bank-bank; banyak bank yang tidak mampu melunasi kewajibannya karena menurunnya nilai tukar rupiah; manajemen bank yang tidak profesional.

Melihat kondisi bermasalah tersebut, pemerintah menjalankan kebijakan reformasi perbankan pada Maret 1999 dengan melakukan penutupan bank, pengambilalihan bank, rekapitulasi 9 bank, dan menginstruksikan 73 bank untuk mempertahankan operasinya tanpa melakukan rekapitulasi sehingga pada tahun 2001 jumlah bank yang tersisa sebanyak 151 bank. Selain melaksanakan kebijakan reformasi perbankan, pada tahun 2004 pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional yaitu dengan dikeluarkannya API (Arsitektur Perbankan Indonesia). Tidak hanya berhenti sampai disitu, untuk

menunjukkan keseriusannya terhadap isu GCG, pada tanggal 30 Januari 2006 Bank Indonesia (BI) mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang lebih dikenal dengan istilah Pakjan 2006, yang isinya mengenai peraturan baru tentang pelaksanaan good corporate governance, bagi bank umum berupa Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Untuk mengatasi masalah-masalah GCG di Indonesia, pada tahun 1999 pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Karena terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1990-an di negara-negara Asia, muncul inisiatif untuk menguatkan kerangka GCG. GCG kembali diulas dan dibenahi peraturan penerapannya (dilakukan reformasi GCG) di Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 dan terjadinya kasus yang melibatkan perusahaan besar dan KAP ternama yaitu Enron dan Arthur Andersen (Nur'ainy, Nurcahyo, A, & B, 2013). Dibenahinya peraturan yang mengatur tentang penerapan GCG ini agar perbaikan praktik dan peraturan GCG dilakukan secara komprehensif (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Pada tahun 2004 KNKCG diubah menjadi KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). Upaya peningkatan implementasi GCG diharapkan dapat meningkatkan implementasi GCG di Indonesia agar sejajar dengan implementasi GCG dengan negara-negara di ASEAN dalam menyambut Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015 (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Penerapan *good corporate governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan stakeholders serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan good corporate governance di dalam perbankan diharapkan dapat

berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan corporate governance ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Penelitian tentang *good corporate governance* memberikan bukti empiris bahwa variabel good corporate governance merupakan faktor penting dalam menentukan nilai perusahaan dan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. *Good Corporate Governance* memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran - sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. *Good Corporate Governance* juga memberikan jaminan keuntungan dan keamanan atas dana yang ditanamkan di bank tidak akan digelapkan oleh pengelola bank. Penerapan *Good Corporate Governance* dapat mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada profitabilitas.

Penelitian ini menggunakan indikator Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen berdasarkan replikasi penelitian Nasution dan Setiawan (2007) yang menyebutkan bahwa “corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan kerangka peraturan”

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur *Good Corporate Governance* antara lain dewan direksi, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam mengawasi perusahaan

memastikan kinerja dan pengelolaan perusahaan oleh manajer dalam mencapai tujuan dan peningkatan kinerja perusahaan. Dewan komisaris dan direksi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan mampu memaksimalkan peranan penting dewan komisaris dalam mengawasi pengelolaan dan kinerja perusahaan, mengingat bahwa dewan komisaris independen berasal dari pihak independen yang bukan merupakan bagian dari dewan direksi, dewan komisaris maupun para pemegang saham.. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Hal ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen mampu mempengaruhi perilaku manajer dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin besar komisaris independen maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin baik sehingga akan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan dan memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan bank. Dewan direksi memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen bank. Dewan direksi juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan program hubungan dengan pihak luar perbankan. Dewan direksi merupakan organ penting dalam perusahaan dan memiliki tugas dan tanggung jawab secara penuh terhadap kepentingan perusahaan.

peningkatan kinerja suatu perusahaan. Adanya dewan direksi yang berperan dalam operasional perusahaan, maka akan meningkatkan kinerja perusahaan yang akan terlihat dari peningkatan kinerja perusahaan dan dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan. Kenyataannya dewan direksi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut sejumlah penelitian, hampir 60 persen dari bank gagal memiliki anggota dewan direksi yang tidak memiliki pengetahuan perbankan atau kurang informasi dan pasif terhadap urusan pengawasan bank (Van Greuning & Bratanovic, 2011: 47). Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal termasuk audit internal. Komite audit ditempatkan sebagai mekanisme pengawasan antara manajemen dengan pihak eksternal. Kurnianingsih dan Supomo (1999) juga menjelaskan bahwa komite audit pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan diharapkan dapat melaksanakan beberapa fungsi, yaitu: menelaah seluruh laporan keuangan untuk menjamin objektivitas, kredibilitas, reliabilitas, integritas, akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan; menelaah kebijakan akuntansi dan memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi; menelaah efektifitas Struktur Pengendalian Internal (SPI)

Komite audit merupakan salah satu karakteristik yang mendukung efektifitas kinerja komite audit dalam suatu perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit tentu akan lebih baik bagi perusahaan. Hal tersebut menunjukkan pengawasan yang lebih maksimal. Adanya komite audit yang independen dalam perusahaan menjadi mutlak untuk kepentingan para *stakeholders* dan juga dapat melindungi kepentingan para pemegang saham. Anggota komite audit di syaratkan berasal dari pihak eksten perusahaan yang independen. Keberadaan komite audit yang independen dalam perusahaan akan membuat kinerja perusahaan akan menjadi baik, jika

perusahaan tersebut mampu untuk mengendalikan perilaku para eksekutif puncak perusahaan dalam melindungi kepentingan para pemegang sahamnya. Pada penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) membuktikan keberadaan komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan.

Data Total Ekuitas dan Laba Bersih Periode 2018-2022

Kode Bank	Tahun	Total Ekuitas	Lab Bersih
BTPN	2018	20.124.890.000.000	1.778.546.000.000
	2019	31.471.928.000.000	2.992.418.000.000
	2020	32.964.753.000.000	2.005.577.000.000
	2021	36.078.927.000.000	3.104.215.000.000
	2022	39.413.024.000.000	3.629.564.000.000
BBCA	2018	151.753.427.000.000	26.762.035.000.000
	2019	174.143.156.000.000	31.138.261.000.000
	2020	184.714.709.000.000	31.036.451.000.000
	2021	202.712.762.000.000	31.867.065.000.000
	2022	221.181.655.000.000	37.432.854.000.000
BABP	2018	1.429.990.000.000	123.084.000.000
	2019	1.559.450.000.000	37.321.000.000
	2020	1.551.237.000.000	38.963.000.000
	2021	2.365.457.000.000	25.331.000.000
	2022	2.712.334.000.000	153.107.000.000

Berdasarkan tabel diatas dilihat bahwa total ekuitas dan Laba bersih pada Bank mengalami fluktuasi yaitu adanya peningkatan dan penurunan. Tahun 2020 BTPN mengalami penurunan yang signifikan total ekuitas dan laba bersih pada tahun 2018 ke tahun 2019 dan begitu juga BABP tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas serta penelitian terdahulu yang relevan maka saya tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan tahun 2018 – 2022)**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Ukuran Komite Audite berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan?
2. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan?
3. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Ukuran Komite Audite berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan?
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan?

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Untuk Menambah dan Memperluas pengetahuan mengenai hubungan Good Corporate Governance dengan kinerja perusahaan.
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, regulator, serta pihak lainnya untuk mengetahui pentingnya Good Corporate Governance sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan yang baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Teori agensi menggambarkan bahwa *agent* memiliki wewenang untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama investor. Suatu konflik agensi dapat terjadi jika terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan para manajernya, sehingga dapat menyebabkan adanya asimetri informasi yang dikarenakan pemilik perusahaan (*principal*) tidak ikut berperan aktif dalam manajemen perusahaan. *Principal* mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan kepada para manajer profesional (*agent*) untuk melakukan pekerjaan atas nama dan untuk kepentingannya.

Teori agensi sangat sulit untuk diterapkan dan memiliki banyak kendala serta masih belum memadai, sehingga diperlukan suatu konsep yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap para stakeholders. Konsep tersebut harus berhubungan dengan masalah-masalah konflik kepentingan dan biaya-biaya agensi yang timbul, sehingga berkembang suatu konsep baru yang memperhatikan dan mengatur kepentingan-kepentingan para pihak terkait dengan kepemilikan dan pengoperasional (*stakeholders*) suatu perusahaan, yaitu konsep *corporate governance*. (Herawaty, 2008) menyatakan bahwa “*Good Corporate Governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang diinvestasikan.

Good Corporate Governance berkaitan dengan bagaimana investor memiliki keyakinan bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor dan yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan, atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan yang berkaitan dengan dana atau modal yang telah ditanamkan oleh investor, serta berkaitan dengan bagaimana seorang investor mengendalikan para manajer.

Teori keagenan merupakan dasar untuk memahami corporate governance. Hal tersebut dikarenakan teori keagenan mengindikasikan bahwa terdapat asimetri informasi antara manajersebagai agen dan pemilik (pemegang saham) sebagai prinsipal, sehingga teori agensi menjadi dasar pemikiran bahwa kinerja perusahaan yang lebih baik dapat dicapai karena adanya good corporate governance. Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini yaitu bahwa kinerja suatu perusahaan yang baik akan dicapai karena pada kenyataan terdapat praktek- praktek pemerintahan yang baik juga. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pemantauan dan perlindungan yang lebih baik kepada para pemegang sahamnya.

2.2 Kinerja Perusahaan

Kinerja Perusahaan merupakan kemampuan sebuah perusahaan mengelola sumber daya yang ada sehingga dapat memberikan nilai kepada perusahaan tersebut. (Bayu Hidayat, 2005) Penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan personelnnya, berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk menilai hasil pencapaian dari aktivitas dibanding dengan target perusahaan. Peningkatan kinerja suatu perusahaan biasanya akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan sehingga biasanya pengukuran kinerja perusahaan dilakukan dengan melakukan analisis aspek yang ada.

Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian tersebut. Dalam penelitian ini pengukuran kinerja perusahaan menggunakan ROE (Return On Equity). Pengembalian ekuitas atau ROE (Return On Equity) adalah salah satu perhitungan yang masuk dalam rasio profitabilitas. ROE merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Return on equity (ROE) adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. ROE dinyatakan dalam persentase dan dihitung dengan rumus ROE (Return On Equity) membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham perusahaan.

2.3 Penerapan Good Corporate Governance

Kata “*governance*” berasal dari bahasa Perancis “*gubernance*” yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi corporate governance. Dalam bahasa Indonesia corporate governance diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan. Bank dunia (*World Bank*) mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah – kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber – sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Beberapa konsep tentang corporate governance antara lain yang dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (1997) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. M

Menurut Prowson, 1998 *Good corporate governance* merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer agar bertindak yang terbaik bagi kepentingan investor. Kaen (2003) menyatakan Good Corporate Governance pada dasarnya menyangkut masalah para pemegang saham yang seharusnya mengendalikan jalannya kegiatan korporasi dan adanya hubungan antara pemegang saham dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan harus dilakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan korporasi.

kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

1) **Responsibilitas (Responsibility)**

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai Good Corporate Governance.

2) **Independensi (Independency)**

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

3) **Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)**

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan.

Listyorini (2001) manfaat penerapan *corporate governance* adalah:

1. **Meningkatkan efisiensi produktivitas**

Hal ini dikarenakan seluruh individu dalam perusahaan memiliki komitmen untuk memajukan perusahaan. Semua individu di perusahaan pada setiap level dan departemen akan berusaha menyumbang segenap

kemampuannya untuk kepentingan perusahaan dan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi atau kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan yang diakibatkan penggunaan sumber daya perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan.

2. Meningkatkan kepercayaan public

Publik dalam hal ini dapat berupa mitra baik sebagai investor, pemasok, pelanggan, kreditor, pemerintah maupun konsumen akhir. Bagi investor dan kreditor penerapan good corporate governance adalah suatu hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelepasan dana investasi maupun kreditnya. Jadi kreditor dan investor akan merasa lebih aman karena perusahaan dijalankan dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan semua pihak dan bukan hanya pihak tertentu saja.

3. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan

4. Dapat mengukur target kinerja perusahaan

Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam mencapai sasaran-sasaran manajemen dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi sasaran pencapaian kinerja manajemen.

2.4 Komite Audit

Komite audit merupakan perpanjangan tangan dari dewan komisaris dalam melakukan kontrol dan monitoring terhadap dewan direksi. Dalam surat edaran Bapepam tahun 2003 mengatakan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim yang disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal audit, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Independensi dalam audit merupakan cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit.

Selain itu, berdasarkan keputusan ketua Bapepam No: KEP- 41/PM/2003 Tanggal 23 Desember 2003 yang mengatur mengenai komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang lain yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Adanya komite audit yang independen dalam perusahaan menjadi mutlak untuk kepentingan para stakeholders dan juga dapat melindungi kepentingan para pemegang saham. Anggota komite audit di syaratkan berasal dari pihak eksten perusahaan yang independen. Keberadaan komite audit yang independen dalam perusahaan akan membuat kinerja perusahaan akan menjadi baik, jika perusahaan tersebut mampu untuk mengendalikan perilaku para eksekutif puncak perusahaan dalam melindungi kepentingan para pemegang sahamnya

2.5 Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan organ penting dalam perusahaan dan memiliki tugas dan tanggung jawab secara penuh terhadap kepentingan perusahaan. Dewan direksi juga memiliki tugas untuk membuat rencana strategis dan memstikan

berjalannya sistem dalam perusahaan. Peran yang dimiliki oleh dewan direksi menjadikannya organ yang sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Perencanaan strategis yang dibuat oleh dewan direksi akan menentukan peningkatan kinerja suatu perusahaan. Adanya dewan direksi yang berperan dalam operasional perusahaan, maka akan meningkatkan kinerja perusahaan yang akan terlihat dari peningkatan kinerja perusahaan dan dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan.

2.6 Dewan Komisaris Independen

Menurut UU No. 40 Tahun 2007, anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen. Komisaris independen (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga lainnya dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. BEI mewajibkan emiten memiliki komisaris independen minimal 30% dari anggota dewan komisaris. Pengukuran komisaris independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persentase jumlah komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris (El-Chaarani, 2014).

2.7 Bank

Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya keuntungan saja (Hasibuan, 2007). Berdasarkan PSAK No. 31, Bank adalah suatu lembaga yang berperan

sebagai perantara keuangan (Financial Intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (Surplus Unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (Deficit Unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi (2002: 68), definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank. Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal. Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (Interbank Call Money) berjangka 1 hari hingga 1 minggu. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antaraharga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hisamuddin dan Tirta (2012)	Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah	Kuantitatif	GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA Dan ROE. Ini menunjukkan bahwa penerapan GCG oleh BI pada Bank Umum dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi dan menumbuhkan kinerja perbankan syariah khususnya dengan harapan dapat menarik investor untuk meningkatkan investasinya
2	Astri dan Amanita (2016)	Pengaruh Good Corporate Governance, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan	Kuantitatif	(1) Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (2) Dewan Direksi, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (3) Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan

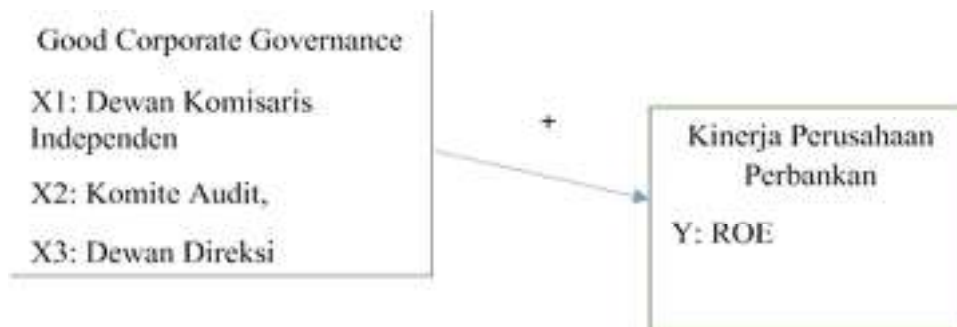
3	Daniel dan Yeterina (2014)	Pengaruh mekanisme Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan Perbankan	Kuantitatif	Dewan direksi memiliki efek positif terhadap kinerja bank. Kepemilikan institusional memiliki efek negatif terhadap kinerja bank. Namun
				kepemilikan manajemen, dewan independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja bank
4	Nizzamullah, Darwanis dan Syukriy (2014)	Pengaruh penerapan corporate governance terhadap kinerja keuangan	Kuantitatif	Penerapan GCG yang diukur dengan nilai komposit PBI No. 8/4/PBI/2006 berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan nasional go publik di Bursa Efek Indonesia yang diukur dengan Return on Asset (ROA)
5	Afrizal (2018)	Pengaruh rasio kesehatan bank dan goof corporate governance terhadap kinerja keuangan Bank Syariah	Kuantitatif	BOPO berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah, sedangkan CAR, NPF, FDR, dan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan variabel tertentu yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual akan menghubungkan antara variabel-variabel peneliti, yaitu variabel independen dengan variabel dependen. Berikut merupakan gambar dari pemikiran pada penelitian ini :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap ROE

Dewan Komisaris Merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan praktik *corporate governance*. Dewan komisaris diyakini memiliki peran penting dalam mengelola perusahaan. Khususnya dalam memonitor manajemen puncak. Perusahaan yang mempunyai persentase dewan komisaris eksternal lebih rendah akan mempunyai pengawasan yang rendah terhadap kinerja perusahaan. Semakin besar ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan mengalami kondisi tekanan keuangan. Dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris, maka fungsi monitoring terhadap kebijakan direksi dapat dijalankan dengan lebih baik lagi, sehingga perusahaan akan terhindar

dari kesulitan keuangan Penelitian yang dilakukan oleh Hardikasari (2014) menyebutkan bahwa penelitian mengenai ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Dalam penelitian tersebut, disebutkan argumen dari yermack (1996), Sundgren dan Wells (1998), dan Jensen (1993), yang menyatakan bahwa semakin banyak personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruk kinerja yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan makin banyaknya anggota dewan komiaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam menjalankan komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris. Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik. Untuk itu masih diperlukan penelitian yang dapat membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris ini terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H_1 : *Dewan komisaris Independen berpengaruh positif terhadap ROE*

2. Pengaruh Komite Audit terhadap ROE

Peranan audit eksternal merupakan faktor utama keberhasilan pengelolaan perusahaan. Pelaporan Keuangan yang di audit oleh KAP *big four* lebih dianggap nyata karena pelaporan keuangan sesuai dengan kinerja perusahaan maka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat asimetri informasi Antara pemilik perusahaan dan manajemen, maka untuk mengurangi konflik kepentingan dengan meningkatkan kualitas audit oleh KAP *big four*. Menurut Ningsih (2019), menyatakan semakin tingginya kualitas audit menunjukkan auditor ahli yang dapat menyebabkan yang dapat tingginya kualitas dalam pelaporan keuangan dan laporan keuangan semakin membaik. Rizki & Wuryani (2021) membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap

kinerjakeuangan. Hal ini dikarenakan bahwa komite audit terhadap kinerja keuangan belum menunjukkan tugas secara signifikan. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Adrianti (2018), membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan bahwa komite audit terhadap kinerja keuangan sudah menunjukkan tugas secara signifikan.

H₂ : Komite Audit berpengaruh positif terhadap ROE.

3. Pengaruh Dewan Direksi terhadap ROE

Dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas dalam mengawasi oprasional perusahaan. Direksi melakukan tugas secara efektif dengan mengambil keputusan yang tepat, cepat efektif, dan bertindak efektif (Ningsih, 2019). Besar atau kecilnya jumlah direksi akan mempengaruhi dalam keberhasilan oprasional perusahaan. Semakin tinggi kualitas kulitas kerja direksi akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, selain itu banyaknya anggota direksi maka masing- masing tugasnya akan memberikan dampak baik bagi stakeholders. Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa jumlah dewan direksi yang semakin bertambah maka dapat menimbulkan ketidak efektifan dalam manajemen menerapkan kebijakan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Rizki & Wuryani (2021) meneliti pengaruh jumlah dewan direksi yang mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan dewan direksi mempunyai peran yang diutamakan bagi masyarakat.

H₃ : Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap ROE.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian Dan Defenisi Oprasional

Variabel merupakan suatu simbol yang berisi suatu nilai. Variabel dalam penelitian inidibagi menjadi dua bagian, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen disebut juga variabel terikat, yaitu variabel yang menjadi fokus utama penelitian. Pada penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah kinerja perusahaan. Proksi pengukuran kinerja perusahaan dengan nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROE. ROE dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Pengukuran ROE sebagai variabel dependen dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas pemegang saham}}$$

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen disebut juga sebagai variabel bebas, dimana variabel tersebut dapat berdiri sendiri dan tidak terikat oleh variabel lainnya. Variabel ini mempengaruhi variabel dependen baik positif maupun negatif. Penelitian ini menggunakan satu variabel independen, yaitu penerapan Good Corporate Governance yang diukur dengan menggunakan indikator terdiri atas proporsi dewan komisaris independen, komite audit, serta dewan direksi

. Pengukuran masing-masing variabel independen yaitu:

3.1.2.1 Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia, komisaris merupakan ketua komite audit. Komite audit merupakan perpanjangan tangan dari dewan komisaris dalam melakukan kontrol dan monitoring terhadap dewan direksi (Manuputty, 2012).

Dalam surat edaran Bapepam tahun 2003 mengatakan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim yang disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan,. Salah satu karakteristik komite audit yaitu independensi komite audit. Independensi merupakan karakteristik komite audit terpenting yang harus dimiliki dalam memenuhi peran pengawasannya terhadap manajemen perusahaan yang juga akan memiliki dampak pada baik buruknya kinerja perusahaan. Independensi dalam audit merupakan cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit (Arens et al, 2005 dalam Manuputty, 2012). Independensi anggota Komite Audit sejalan dengan Komite Nasional Kebijakan Corporate governance (2001) dalam Manuputty (2012) yang mensyaratkan minimal dua anggota komite audit yang berfungsi sebagai ketua dan anggota komite audit. Salah satu Peraturan mengenai pencatatan efek nomor I-A membahas tentang ketentuan umum pencatatan efek yang bersifat ekuitas mengatur bahwa keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota. Selain itu,

berdasarkan keputusan ketua Bapepam No: KEP- 41/PM/2003 Tanggal 23 Desember 2003 yang mengatur mengenai komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang lain yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Adanya komite audit yang independen dalam perusahaan menjadi mutlak untuk kepentingan para stakeholders dan juga dapat melindungi kepentingan para pemegang saham. Anggota komite audit di syaratkan berasal dari pihak eksten perusahaan yang independen. Keberadaan komite audit yang independen dalam perusahaan akan membuat kinerja perusahaan akan menjadi baik, jika perusahaan tersebut mampu untuk mengendalikan perilaku para eksekutif puncak perusahaan dalam melindungi kepentingan para pemegang sahamnya.

Proporsi Komite Audit = Komite Audit Yang Independen

3.1.2.2 Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan organ penting dalam perusahaan dan memiliki tugas dan tanggung jawab secara penuh terhadap kepentingan perusahaan. Dewan direksi juga memilikitugas untuk membuat rencana strategis dan memastikan berjalannya sistem dalam perusahaan. Peran yang dimiliki oleh dewan direksi menjadikannya organ yang sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Perencanaan strategis yang dibuat oleh dewan direksi akan menentukan peningkatan kinerja suatu perusahaan. Adanya dewan direksi yang berperan dalam operasional perusahaan, maka akan meningkatkan kinerja perusahaan yang akan terlihat dari peningkatan kinerja perusahaan dan dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan.

3.1.2.3 Dewan Komisaris independen

Menurut UU No. 40 Tahun 2007, anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen. Komisaris independen (UU No. 40 Tahun 2007) adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan

keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga lainnya dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. BEI mewajibkan emiten memiliki komisaris independen minimal 30% dari anggota dewan komisaris. Pengukuran komisaris independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persentase jumlah komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris (El-Chaarani, 2014).

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank yang dilisted di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. Bank umum yang dilisted di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 sebanyak 45 bank.

Tabel 3.2

Bank di Bursa Efek Indonesia 2018-2020

No	Kode	Emiten
1	AGRO	Bank Raya Indonesia Tbk.
2	AGRS	Bank Agris Tbk.
3	ARTO	Bank Artos Indonesia Tbk.
4	BABP	Bank MNC Internasional

		Tbk
5	BACA	Bank Capital Indonesia Tbk.
6	BBCA	Bank Central Asia Tbk.
7	BBHI	Bank Harda Internasional Tbk.
8	BBKP	Bank Bukopin Tbk.
9	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk.
10	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero
11	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan Tbk
12	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero
13	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero)

14	BBYB	Bank Yudha Bhakti Tbk.
15	BCIC	Bank JTrust Indonesia Tbk.
16	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.
17	BEKS	Bank Pembangunan Daerah Banten
18	BGTG	Bank Ganesha Tbk.
19	BINA	Bank Ina Perdana Tbk.
20	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa B
21	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa T
22	BKSW	Bank QNB Indonesia Tbk.
23	BMAS	Bank Maspion Indonesia Tbk.
24	BMRI	Bank Mandiri

		(Persero) Tbk.
25	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk.
26	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.
27	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk.
28	BNLI	Bank Permata Tbk.
29	BRIS	Bank BRIsyariah Tbk.
30	BSIM	Bank Sinarmas Tbk.
31	BSWD	Bank Of India Indonesia Tbk.
32	BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Nasion
33	BTPS	Bank Tabungan Pensiunan Nasion
34	BVIC	Bank Victoria International Tb
35	DNAR	Bank Dinar

		Indonesia Tbk.
36	INPC	Bank Artha Graha Internasional
37	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tb
38	MCOR	Bank China Construction Bank I
39	MEGA	Bank Mega Tbk.
40	NAGA	Bank Mitraniaga Tbk.
41	NISP	Bank OCBC NISP Tbk.
42	NOBU	Bank Nationalnobu Tbk.
43	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk
44	PNBS	Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
45	SDRA	Bank Woori

		Saudara Indonesia 1
--	--	------------------------

Sumber: www.idx.co.id

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dari penelitian ini adalah bank Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 yang memenuhi kriteria penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan sampel yang diambil dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu.

Adapun kriteria pengambilan sampel yang ditetapkan oleh peneliti didalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selama periode pengamatan tahun 2018-2020.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan pada tahun 2009-2014.
3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah.
4. Perusahaan memiliki data mengenai dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data skunder yaitu laporan keuangan tahunan perbankan di Indonesia dengan tahun penelitian 2018-2020 yang terdaftar di Direktori Bank Indonesia. Data

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.3.2 Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, yang diperoleh peneliti dari website BEI yaitu www.idx.co.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur dan bahan pustaka lainnya seperti artikel, jurnal, buku dan penelitian terdahulu.

2. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data skunder yang berupa laporan keuangan tahun diperoleh dari Direktori perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah sebuah regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai normal ataukah tidak mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

3.5.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai Tolerance (TOL) dan metode VIF (Variance Inflation Factor). Nilai TOL berkebalikan dengan VIF.

TOL adalah besarnya variasi dari satu variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Sedangkan VIF menjelaskan derajat suatu variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai TOL yang rendah adalah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF=1/TOL$).

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda disebut heteroskedastisitas.

3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problema autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

3.5.2 Multiple Regresi

Regresi linear berganda yaitu suatu model linear regresi yang variabel dependennya merupakan fungsi linear dari beberapa variabel bebas. Regresi linear berganda sangat

bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji. Hubungan fungsi antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independent dapat dilakukan dengan analisis regresi linear berganda, dimana kinerja bank sebagai variabel dependen, sedangkan Good Corporate Governance sebagai variabel independent

Persamaan Multiple Regresion yang digunakan adalah

$$Y = b_0 + X_1 + X_2 + X_3 + e$$

Y = Kinerja Perusahaan

b₀ = Konstanta

X₁ = Komite Audit

X₂ = Dewan Direksi

X₃ = Dewan Komisaris Independen

e = Error

3.5.3 Pengujian Hipotesis

3.5.3.1 Uji Statistik t

Pengujian ini untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependennya.

1. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H₀ ditolak. Maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau dikatakan dengan hipotesis ditolak.

2. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima. Maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen atau dikatakan dengan hipotesis diterima.

Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi $>$ dari α (0,05) maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara individual variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Tetapi apabila nilai signifikansi $<$ dari α (0,05) maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan), berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.3.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen. R^2 digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisa regresi berganda. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1, jika R^2 mendekati nol maka semakin lemah variasi variabel independen menerangkan variasi variabel dependen.

